



















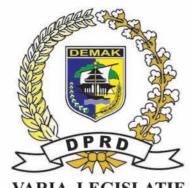
Komisaris, Direksi, Staff dan Karyawan







## \*Raih WTP Tujuh Kali DPRD Demak Minta Pemkab Lebih Baik Lagi Jalankan APBD



AMIKOM

VARIA LEGISLATIF

DEMAK (KR) - Kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak 2022 tentunya merupakan prestasi luar biasa. Terlebih prestasi itu diraih dalam kurun waktu tujuh tahun

Sehubungan itu, di sela Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda

'Penyerahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2022' Ketua DPRD Kabupaten Demak HS Fahrudin Bisri Slamet menyampaikan apresiasi atas diraihnya opini WTP ke-7 dari BPK tersebut. Menurutnya, penghargaan tersebut berkah dari kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif, serta kerja keras OPD terkait.

"Pastinya WTP ke-7 ini harus menjadi pelecut agar lebih baik lagi menjalankan APBD kedepannya," tuturnya, Senin (26/6).

Disampaikan pula, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK berupa opini WTP berkat sinergi semua pihak terkait yang bekerja secara cepat dan tepat sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Opini dari BPK tentunya sangat berpengaruh pada citra pemerintah.

Di sisi lain, secara garis besar Bupati Demak dr Hj Eisti'anah mengungkapkan, secara garis besar ada kenaikan cukup signifikan pada pendapatan daerah yang terlihat pada realisasi APBD 2022 dibandingkan 2021. Disebutkan dari target Rp 2,410 triliun, dapat terealisasi 101,58 persen menjadi Rp 2,402 triliun. Naik 1,58 persen dibandingkan tahun



Bupati Demak dr Hj Eisti'anah didampingi Wabup KH Ali Makhsun saat menyerahkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak 2022 kepada ketua DPRD Kabupaten Demak HS Fahrudin Bisri Slamet, disaksikan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Gerindra H Maskuri.

sebelumnya yakni Rp 2,365 triliun.

Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 477,198 miliar, "Pendapatan tersebut meliputi Pendapatan pendapatan transfer Rp 1,914 triliun, serta lainlain pendapatan yang sah sebesar Rp 11,180 miliar," kata bupati.

Sementara belanja daerah tercatat sebesar Rp 2,046 miliar. Terdiri dari belanja operasional Rp 1,702 triliun, dan belanja modal Rp 344,301 miliar. Sedangkan belanja tak terduga sebesar Rp 2,600 miliar tak digunakan karena tak ada kejadian mendesak yang memerlukannya.

Sedangkan pembiayaan netto disebutkan sebesar Rp 227,250 miliar. Sehingga muncul sisa lebih penggunaan anggara atau Silpa sebesar Rp 142,637 miliar.

Mengenai capaian tersebut Bupati Eisti'anah menyampaikan berkat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari seluruh elemen. Termasuk dukungan dari jajaran legislatif, sehingga berbuah opini WTP.

"Kedepan, kami akan terus bekerja secara maksimal, melakukan berbagai percepatan, serta menindaklanjuti setiap rekomendasi dan selalu melakukan perbaikan. Tentunya demi terwujudnya good government dan clean governance," tandas bupati. \* ssj